



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diperlukan peta jabatan yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan aparatur sipil negara untuk setiap jenjang jabatan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 27 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 4. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Menetapkan Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan dalam penataan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 27 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI

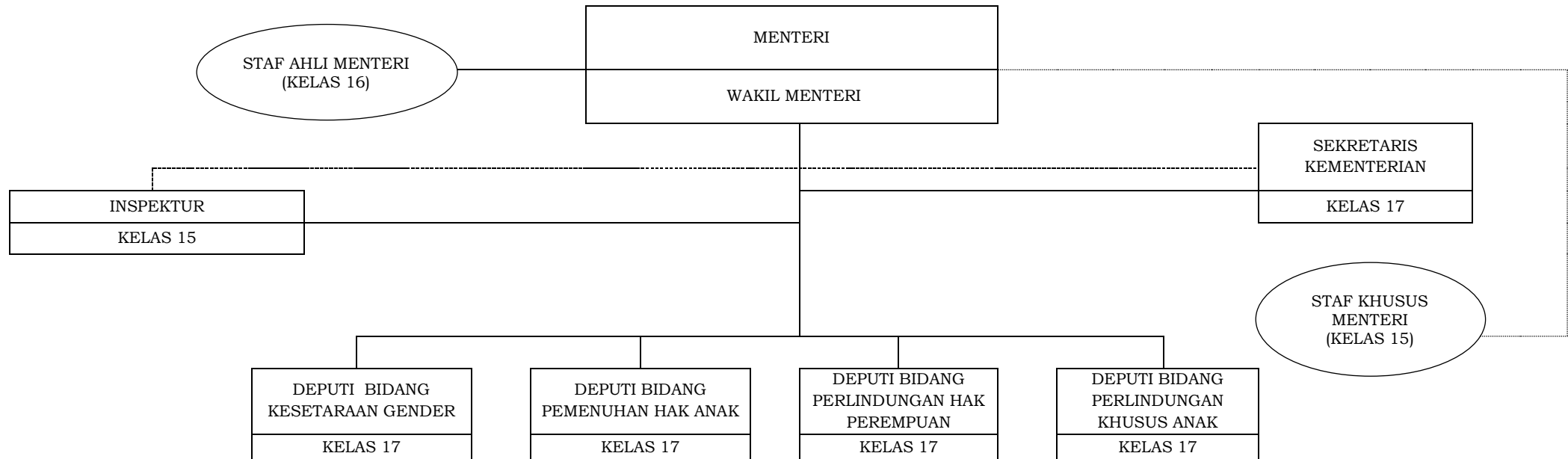


MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

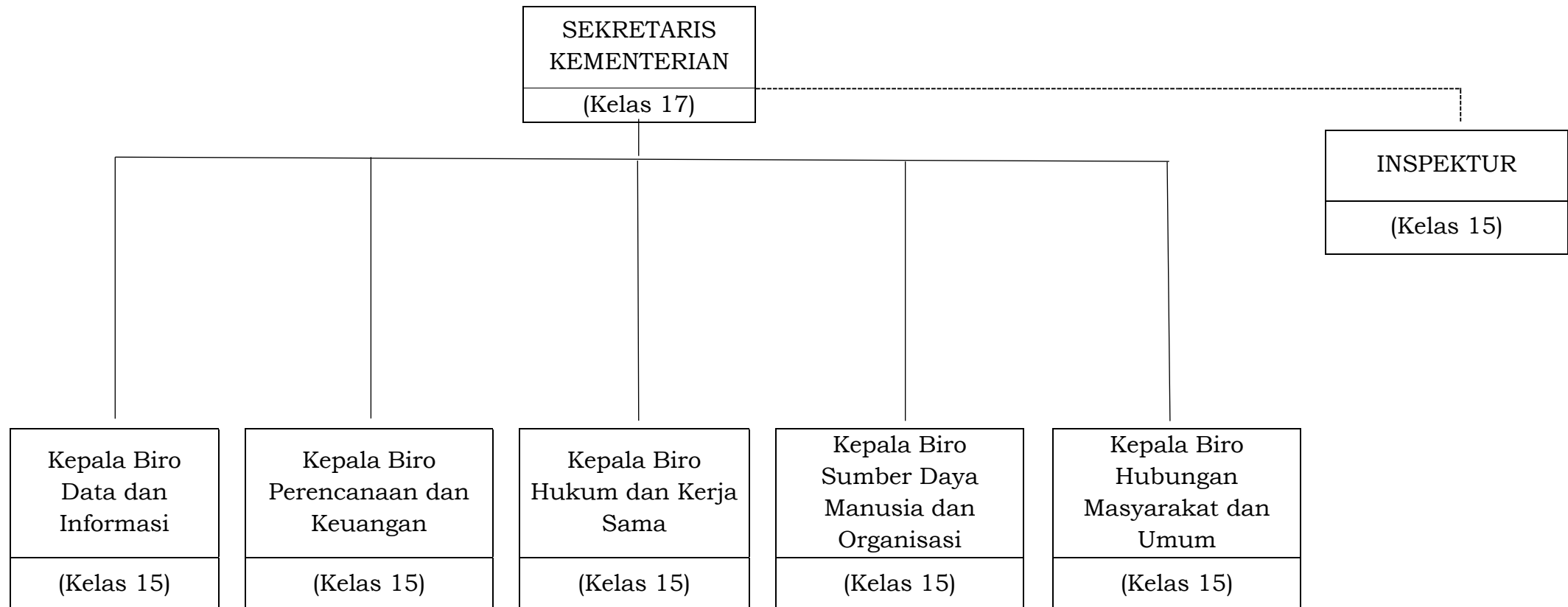




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

I. PETA JABATAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

A. PETA JABATAN BIRO DATA DAN INFORMASI

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Kepala Biro Data dan Informasi	15	1	0	1	0	0	0	
Pranata Komputer Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0	
Pranata Komputer Ahli Madya	11	1	0	0	0	-1	0	
Pranata Komputer Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	2	0	2	0	0	0	
Pranata Komputer Ahli Muda	9	2	0	0	0	-2	0	
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1	7	1	8	0	1	
Pranata Komputer Penyelia	8	1	0	0	0	-1	0	
Pranata Komputer Mahir	7	0	1	0	1	0	0	
Pranata Komputer Terampil	6	2	0	0	0	-2	0	
Manggala Informatika Ahli Madya	12	2	0	0	0	-2	0	
Manggala Informatika Ahli Muda	10	2	0	0	0	-2	0	
Manggala Informatika Ahli Pertama	8	4	0	0	0	-4	0	
Statistisi Ahli Utama	13	0	0	0	0	0	0	
Statistisi Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0	
Statistisi Ahli Madya	11	3	0	0	0	-3	0	
Statistisi Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	2	0	2	0	0	0	
Statistisi Ahli Muda	9	5	0	1	0	-4	0	
Statistisi Ahli Pertama	8	5	10	0	10	-5	0	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Asisten Statistisi Penyelia	8	1	0	0	0	-1	0	
Asisten Statistisi Mahir	7	3	0	0	0	-3	0	
Asisten Statistisi Terampil	6	5	0	0	0	-5	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	0	0	0	-3	0	
Penata Layanan Operasional	7	10	2	0	0	-10	-2	
Pengolah Data dan Informasi	6	2	0	1	0	-1	0	
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	0	0	0	-1	

TOTAL PEGAWAI	59	21	9	19	-50	-2
	80		28		-52	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

B. PETA JABATAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	15	1	0	1	0	0	0	
Analisis Anggaran Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0	
Analisis Anggaran Ahli Madya	12	1	0	0	0	-1	0	
Analisis Anggaran Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	4	0	4	0	0	0	
Analisis Anggaran Ahli Muda	10	0	0	0	0	0	0	
Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	6	0	1	0	-5	0	
Perencana Ahli Utama	14	0	0	0	0	0	0	
Perencana Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Madya	12	3	0	0	0	-3	0	
Perencana Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Muda	10	11	0	0	0	-11	0	
Perencana Ahli Pertama	8	9	4	4	4	-5	0	
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12	2	0	0	0	-2	0	
Analisis Pengelolaan Keunagan APBN Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	2	0	2	0	0	0	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	0	0	0	0	0	0	
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	2	0	1	0	-1	0	
Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	2	0	0	0	-2	0	
Pranata Keuangan APBN Mahir	8	2	0	0	0	-2	0	
Pranata Keuangan APBN Terampil	7	5	0	5	0	0	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	0	1	0	-4	0	
Pengolah Data dan Informasi	6	7	0	5	0	-2	0	
Pengadministrasian Perkantoran	5	3	1	3	0	0	-1	

TOTAL PEGAWAI	68	5	30	4	-38	-1
	73		34		-39	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

C. PETA JABATAN BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	15	1	0	1	0	0	0	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	12	1	0	0	0	-1	0	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	3	0	3	0	0	0	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10	4	0	0	0	-4	0	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8	4	0	1	0	-3	0	
Analisis Hukum Ahli Madya	11	2	0	0	0	-2	0	
Analisis Hukum Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	2	0	2	0	0	0	
Analisis Hukum Ahli Muda	9	0	0	0	0	0	0	
Analisis Hukum Ahli Pertama	8	2	0	0	0	-2	0	
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	1	0	0	0	-1	0	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0	
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	2	0	2	0	0	0	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Analisis Kerja Sama Ahli Madya	11	0	0	0	0	0	0	
Analisis Kerja Sama Ahli Muda	9	0	0	0	0	0	0	
Analisis Kerja Sama Ahli Pertama	8	0	0	0	0	0	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	0	4	0	-1	0	
Penata Layanan Operasional	7	2	0	0	0	-2	0	
Pengolah Data dan Informasi	6	3	0	2	0	-1	0	
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	0	0	0	-1	

TOTAL PEGAWAI	33	1	15	0	-18	-1
	34		15		-19	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -

D. PETA JABATAN BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	15	1	0	1	0	0	0	
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12	6	0	0	0	-6	0	
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	5	0	5	0	0	0	
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	2	0	0	0	-2	0	
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	4	4	1	4	-3	0	
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	2	0	1	0	-1	0	
Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya	12	3	0	0	0	-3	0	
Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda	10	4	0	0	0	-4	0	
Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	8	5	0	0	0	-5	0	
Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8	1	0	0	0	-1	0	
Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7	1	0	0	0	-1	0	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6	1	0	1	0	0	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	7	0	4	0	-3	0	
Penata Layanan Operasional	7	2	0	0	0	-2	0	
Pengolah Data dan Informasi	6	2	0	1	0	-1	0	
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	0	0	0	-1	

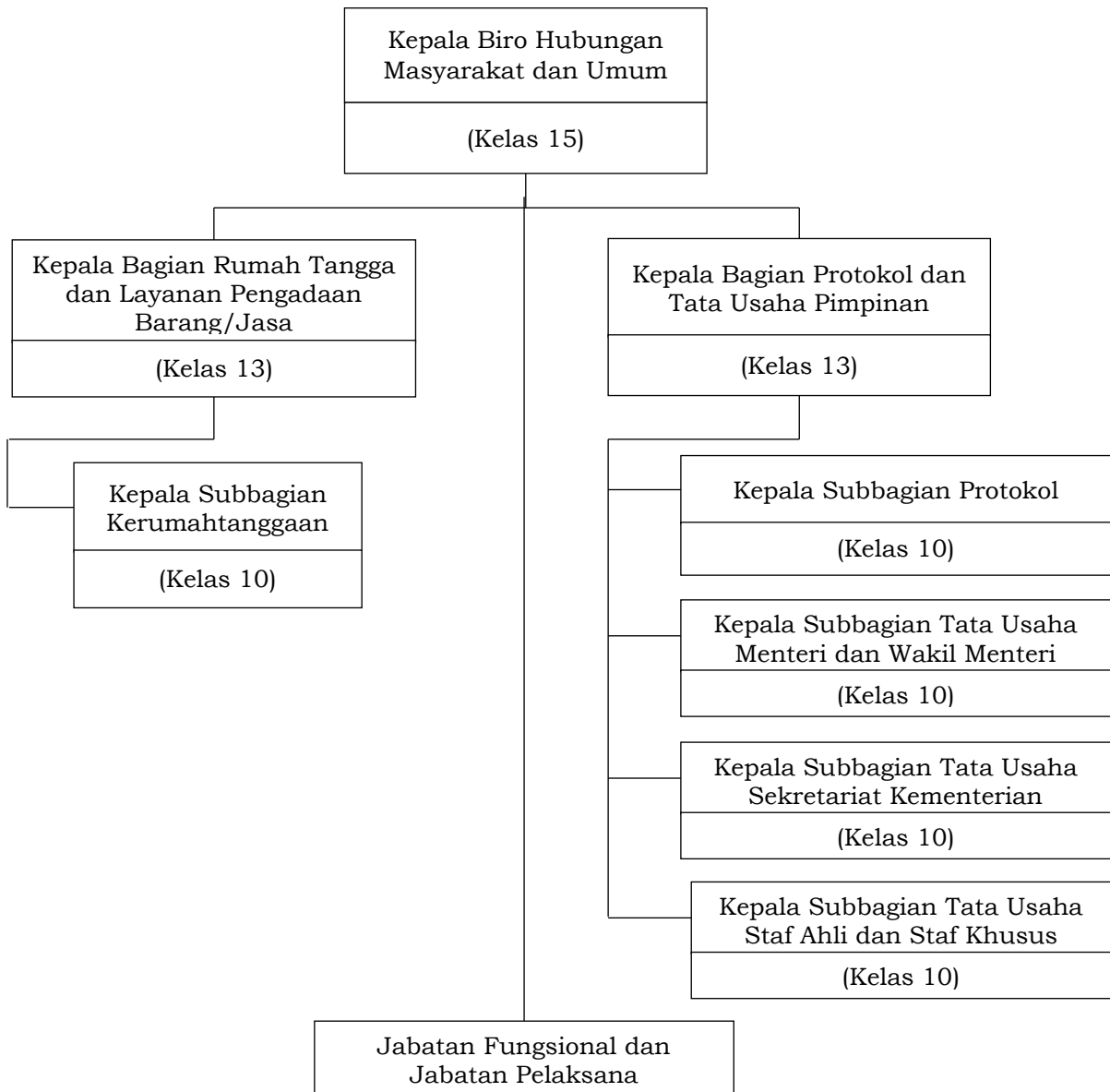
TOTAL PEGAWAI	46	5	14	4	-32	-1
	51		18		-33	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

E. PETA JABATAN BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM



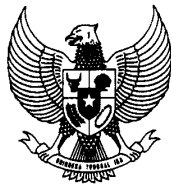
Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	15	1	0	1	0	0	0	
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	0	1	0	0	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11	5	0	0	0	-5	0	
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	2	0	2	0	0	0	
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	8	2	0	2	-8	0	
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	6	2	4	2	-2	0	
Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	0	4	0	4	0	0	
Dokter Ahli Muda	10	1	0	1	0	0	0	
Dokter Ahli Pertama	9	1	1	0	1	-1	0	
Perawat Ahli Madya	11	1	0	0	0	-1	0	
Perawat Ahli Muda	9	2	0	1	0	-1	0	
Perawat Ahli Pertama	8	3	0	1	0	-2	0	
Perawat Penyelia	8	2	0	0	0	-2	0	
Perawat Mahir	7	1	0	0	0	-1	0	
Perawat Terampil	6	2	0	0	0	-2	0	
Apoteker Ahli Muda	9	1	0	0	0	-1	0	
Apoteker Ahli Pertama	8	0	1	0	1	0	0	
Dokter Gigi Ahli Madya	12	1	0	0	0	-1	0	
Dokter Gigi Ahli Muda	10	1	0	1	0	0	0	
Dokter Gigi Ahli Pertama	9	1	0	0	0	-1	0	
Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	1	0	0	0	-1	0	
Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7	1	0	0	0	-1	0	
Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6	0	1	0	1	0	0	
Pustakawan Ahli Madya	11	2	0	1	0	-1	0	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pustakawan Ahli Muda	9	3	0	0	0	-3	0	
Pustakawan Ahli Pertama	8	4	0	1	0	-3	0	
Asisten Perpustakaan Penyelia	8	1	0	0	0	-1	0	
Asisten Perpustakaan Mahir	7	2	0	0	0	-2	0	
Asisten Perpustakaan Terampil	6	4	0	0	0	-4	0	
Arsiparis Ahli Madya	11	2	0	1	0	-1	0	
Arsiparis Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0	
Arsiparis Ahli Muda	9	3	2	0	2	-3	0	
Arsiparis Ahli Pertama	8	2	5	0	5	-2	0	
Arsiparis Penyelia	8	0	1	0	1	0	0	
Arsiparis Mahir	7	0	3	0	3	0	0	
Arsiparis Terampil	6	2	0	1	0	-1	0	
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0	
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0	
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	6	3	1	3	-5	0	
Penata Laksana Barang Penyelia	9	0	0	0	0	0	0	
Penata Laksana Barang Mahir	8	2	0	0	0	-2	0	
Penata Laksana Barang Terampil	6	4	0	4	0	0	0	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	0	3	0	0	0	
Pengolah Data dan Informasi	6	1	0	1	0	0	0	
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	9	0	0	0	-9	

1. Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	13	1	0	1	0	0	0	
Kepala Subbagian Kerumahtanggaan	10	1	0	1	0	0	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	0	2	0	0	0	
Penata Layanan Operasional	7	1	1	1	0	0	-1	
Pengolah Data dan Informasi	6	5	0	2	0	-3	0	
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	0	0	0	-1	

2. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan	13	1	0	1	0	0	0	

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Kepala Subbagian Protokol	10	1	0	1	0	0	0	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Penata Keprotokolan	7	9	0	6	0	-3	0	
Pengelola Keprotokolan	6	2	0	2	0	0	0	
Pengolah Data dan Informasi	6	1	0	0	0	-1	0	

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri dan Wakil Menteri	10	1	0	1	0	0	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	0	2	0	-2	0	
Pengolah Data dan Informasi	6	2	0	2	0	0	0	

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Kepala Subbgaian Tata Usaha Sekretariat Kementerian	10	1	0	1	0	0	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	0	1	0	-1	0	
Pengolah Data dan Informasi	6	1	0	0	0	-1	0	

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus	10	1	0	0	0	-1	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	0	0	0	-2	0	
Penata Layanan Operasional	7	0	2	0	0	0	-2	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

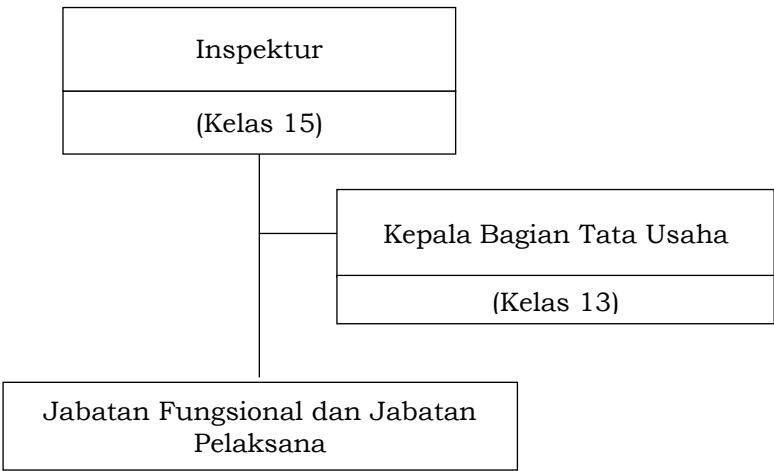
Pengolah Data dan Informasi	6	1	0	0	0	-1	0	
-----------------------------	---	---	---	---	---	----	---	--

TOTAL PEGAWAI	125	38	50	26	-74	-13
	163		76		-87	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -

F. INSPEKTORAT



Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Inspektur	15	1	0	1	0	0	0	
Auditor Ahli Utama	14	1	0	0	0	-1	0	
Auditor Ahli Madya	12	2	0	2	0	0	0	
Auditor Ahli Muda	10	6	0	2	0	-4	0	
Auditor Ahli Pertama	8	6	0	2	0	-4	0	
Auditor Penyelia	9	0	0	0	0	0	0	
Auditor Mahir	7	0	0	0	0	0	0	
Auditor Terampil	6	6	0	3	0	-3	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	0	0	0	-2	0	

1. Bagian Tata Usaha

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Kepala Bagian Tata Usaha	13	1	0	0	0	-1	0	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	0	0	0	-4	0	
Pengolah Data dan Informasi	6	2	0	1	0	-1	0	

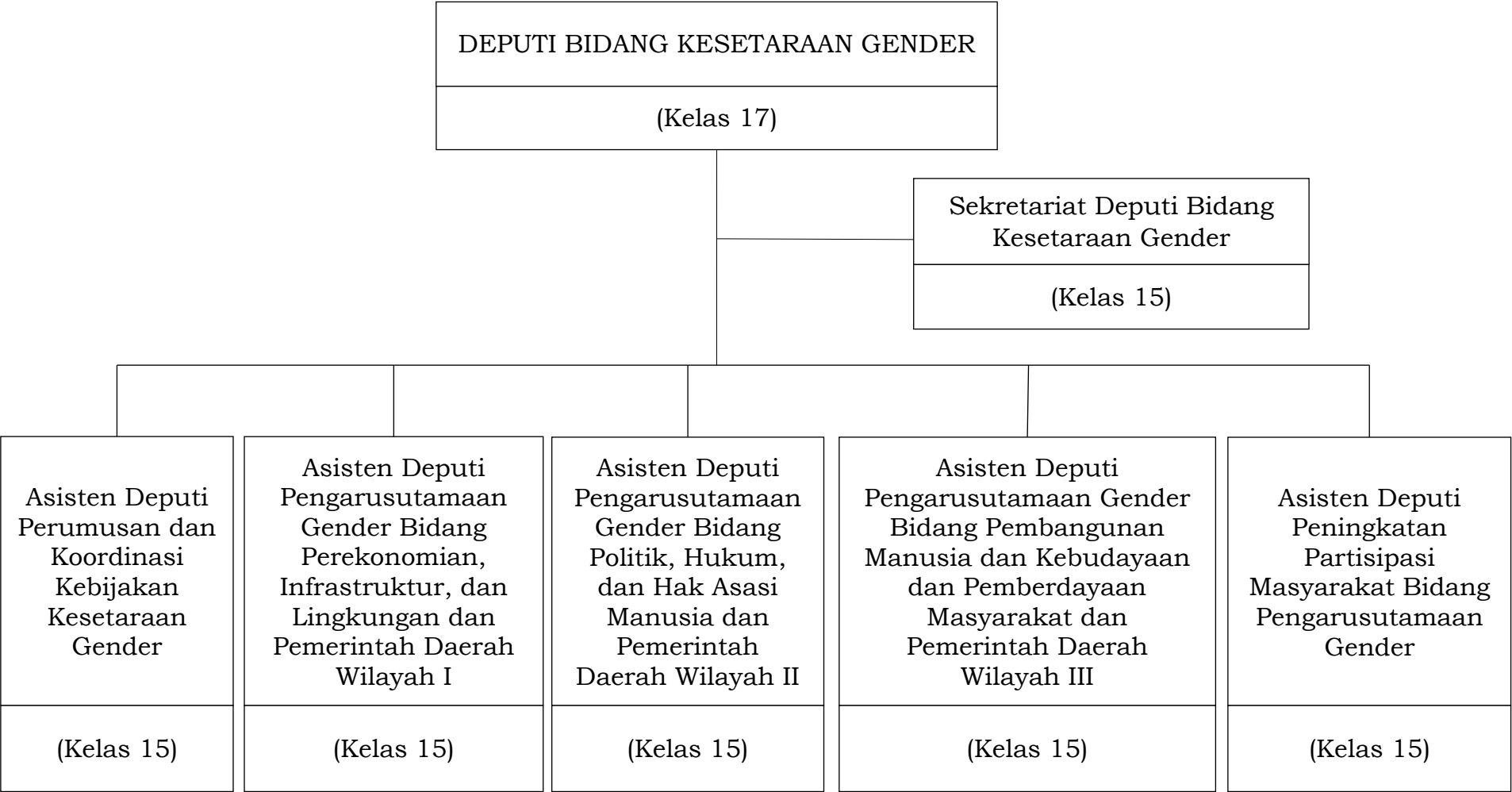
TOTAL PEGAWAI	31	0	11	0	-20	0
	31		11		-20	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

II. PETA JABATAN DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

A. PETA JABATAN SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KESETARAAN
GENDER

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Sekretaris Deputy Bidang Kesetaraan Gender	15	1	0	1	0	0	0	
Analisis Anggaran Ahli Madya	12	2	0	0	0	-2	0	
Analisis Anggaran Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	2	0	2	0	0	0	
Analisis Anggaran Ahli Muda	10	0	0	0	0	0	0	
Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	4	0	0	0	-4	0	
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0	
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12	0	0	0	0	0	0	
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0	
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	0	0	0	0	0	0	
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	0	0	0	0	0	0	
Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	1	0	0	0	-1	0	
Pranata Keuangan APBN Mahir	8	2	0	0	0	-2	0	
Pranata Keuangan APBN Terampil	7	3	0	3	0	0	0	
Arsiparis Mahir	7	2	0	0	0	-2	0	
Arsiparis Terampil	6	1	1	0	1	-1	0	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -

Perencana Ahli Pertama	8	2	0	1	0	-1	0	
Analisis Hukum Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0	
Analisis Hukum Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0	
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0	
Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	7	2	0	0	0	-2	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	0	3	0	-2	0	
Penata Layanan Operasional	7	0	2	0	0	0	-2	
Pengolah Data dan Informasi	6	2	0	2	0	0	0	
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	0	0	0	-1	

TOTAL PEGAWAI	34	4	14	1	-20	-3
	38		15		-23	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
- 25 -

B. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN DAN KOORDINASI
KEBIJAKAN KESETARAAN GENDER

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Kesetaraan Gender	15	1	0	1	0	0	0	
Analisis Kebijakan Ahli Utama	14	0	0	0	0	0	0	
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	2	0	2	0	0	0	
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	2	0	1	0	-1	0	
Analisis Kebijakan Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	2	0	2	0	0	0	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	2	0	0	0	-2	0	
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	4	3	3	3	-1	0	
Perencana Ahli Muda	10	2	0	0	0	-2	0	
Perencana Ahli Pertama	8	2	0	0	0	-2	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	0	0	0	-3	0	
Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	3	0	0	0	-3	0	

TOTAL PEGAWAI	23	3	9	3	-14	0
	26		12		-14	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -

C. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PENGARUSUTAMAAN GENDER
BIDANG PEREKONOMIAN, INFRASTRUKTUR, DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN DAN PEMERINTAH DAERAH WILAYAH I

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan dan Pemerintah Daerah Wilayah I	15	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Utama	14	0	0	0	0	0	0	
Perencana Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	2	0	2	0	0	0	
Perencana Ahli Madya	12	0	0	0	0	0	0	
Perencana Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Muda	10	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Pertama	8	6	0	5	0	-1	0	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0	
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	2	0	0	0	-2	0	
Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	4	0	1	0	-3	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	0	0	0	-4	0	

TOTAL PEGAWAI	22	0	11	0	-11	0
	22		11		-11	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
- 27 -

D. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PENGARUSUTAMAAN GENDER
BIDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
PEMERINTAH DAERAH WILAYAH II

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Wilayah II	15	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Utama	14	0	0	0	0	0	0	
Perencana Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Madya	12	1	0	0	0	-1	0	
Perencana Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	2	0	2	0	0	0	
Perencana Ahli Muda	10	0	0	0	0	0	0	
Perencana Ahli Pertama	8	4	2	3	2	-1	0	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0	
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0	
Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	3	0	1	0	-2	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	0	0	0	-2	0	
TOTAL PEGAWAI		16	2	8	2	-8	0	
		18		10		-8		



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
- 28 -

E. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PENGARUSUTAMAAN GENDER
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH WILAYAH
III

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III	15	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Utama	14	0	0	0	0	0	0	
Perencana Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Madya	12	1	0	0	0	-1	0	
Perencana Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0	
Perencana Ahli Pertama	8	5	1	4	1	-1	0	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0	
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0	
Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	3	0	1	0	-2	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	0	0	0	-3	0	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
- 29 -

TOTAL PEGAWAI	18	1	8	1	-10	0
	19		9		-10	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

F. ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT BIDANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat bidang Pengarusutamaan Gender	15	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Utama	14	0	0	0	0	0	0	
Perencana Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	0	0	-1	0	
Perencana Ahli Madya	12	1	0	0	0	-1	0	
Perencana Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	0	0	0	0	0	0	
Perencana Ahli Muda	10	2	0	0	0	-2	0	
Perencana Ahli Pertama	8	6	0	0	0	-6	0	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0	
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0	
Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	4	0	0	0	-4	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	0	0	0	-4	0	

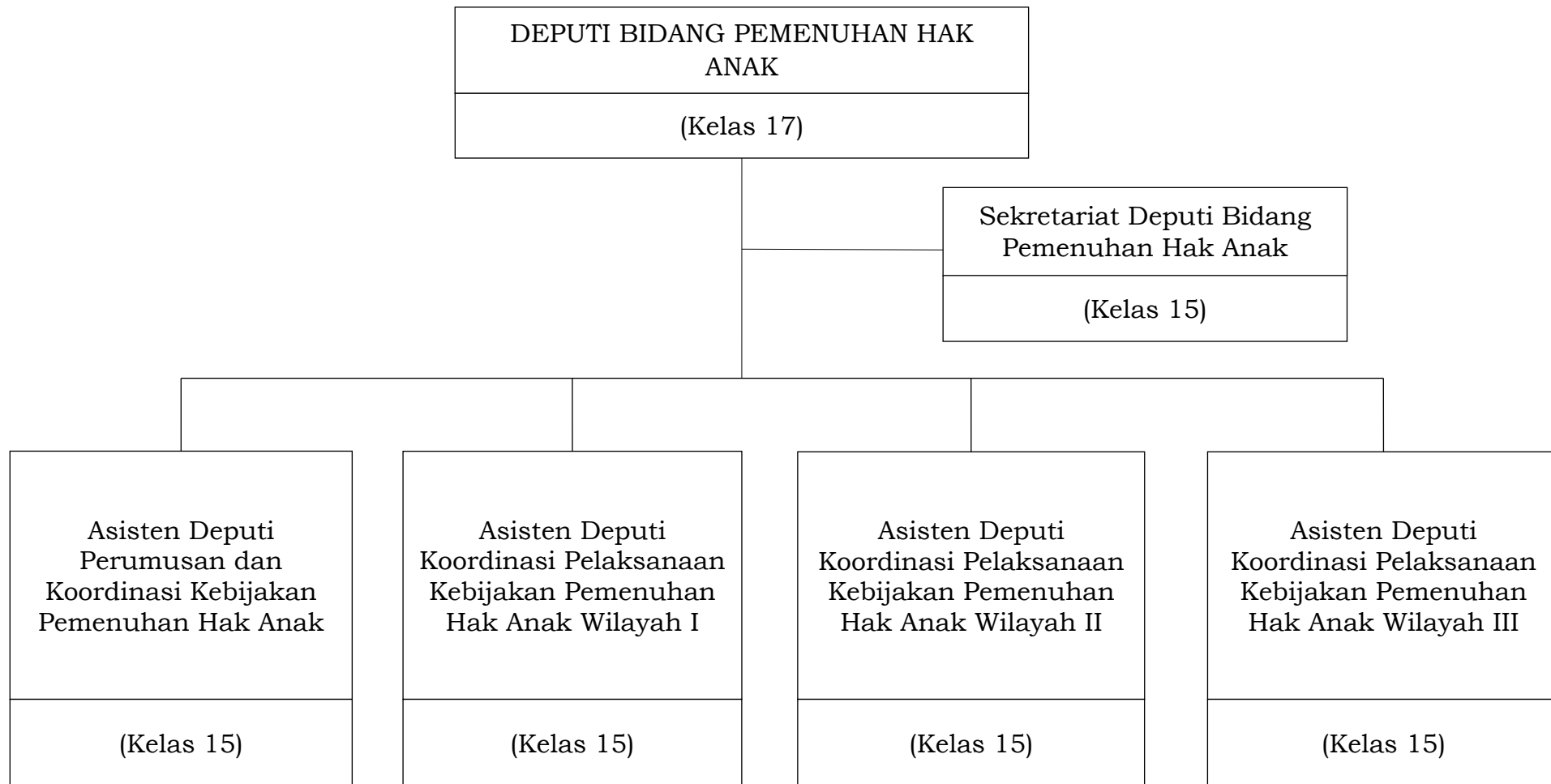
TOTAL PEGAWAI	21	0	1	0	-20	0
	21		1		-20	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

III. PETA JABATAN DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

A. PETA JABATAN SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Sekretaris Deputi bidang Pemenuhan Hak Anak	15	1	0	1	0	0	0	
Analisis Anggaran Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	2	0	1	0	
Analisis Anggaran Ahli Madya	12	0	0	0	0	0	0	
Analisis Anggaran Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0	
Analisis Anggaran Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0	
Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	4	0	0	0	-4	0	
Perencana Ahli Pertama	8	2	0	0	0	-2	0	
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	0	0	0	0	0	0	
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12	1	0	1	0	0	0	
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	0	0	0	0	0	0	
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	0	0	0	0	0	0	
Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	1	0	0	0	-1	0	
Pranata Keuangan APBN Mahir	8	2	0	0	0	-2	0	
Pranata Keuangan APBN Terampil	7	3	0	3	0	0	0	
Arsiparis Mahir	7	2	0	0	0	-2	0	
Arsiparis Terampil	6	1	1	0	1	-1	0	
Analisis Hukum Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0	
Analisis Hukum Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0	
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0	
Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	7	2	0	0	0	-2	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	0	3	0	-2	0	
Penata Layanan Operasional	7	0	2	0	0	0	-2	
Pengolah Data dan Informasi	6	2	0	2	0	0	0	
Pengadministrasian Perkantoran	5	0	2	0	0	0	-2	

TOTAL PEGAWAI	33	5	13	1	-20	-4
	38		14		-24	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

B. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN DAN KOORDINASI
KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ANAK

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	15	1	0	1	0	0	0	
Analisis Kebijakan Ahli Utama	14	0	0	0	0	0	0	
Analisis Kebijakan Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0	
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	3	0	1	0	-2	0	
Analisis Kebijakan Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	3	0	0	0	-3	0	
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	4	3	2	3	-2	0	
Perencana Ahli Muda	10	2	0	0	0	-2	0	
Perencana Ahli Pertama	8	2	0	0	0	-2	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	0	2	0	-1	0	
Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	3	0	0	0	-3	0	

TOTAL PEGAWAI	23	3	8	3	-15	0
	26		11		-15	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
- 35 -

C. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ANAK WILAYAH I

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I	15	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Utama	14	0	0	0	0	0	0	
Perencana Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Madya	12	1	0	0	0	-1	0	
Perencana Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0	
Perencana Ahli Pertama	8	2	4	2	4	0	0	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0	
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0	
Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	2	0	0	0	-2	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	0	0	0	-1	0	

TOTAL PEGAWAI	12	4	5	4	-7	0
	16		9		-7	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

D. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ANAK WILAYAH II

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II	15	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Utama	14	0	0	0	0	0	0	
Perencana Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Madya	12	1	0	0	0	-1	0	
Perencana Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	2	0	2	0	0	0	
Perencana Ahli Muda	10	0	0	0	0	0	0	
Perencana Ahli Pertama	8	2	4	4	4	2	0	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0	
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0	
Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	2	0	1	0	-1	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	0	0	0	-1	0	

TOTAL PEGAWAI	12	4	9	4	-3	0
	16		13		-3	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

E. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ANAK WILAYAH III

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Wilayahh III	15	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Utama	14	0	0	0	0	0	0	
Perencana Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Madya	12	1	0	0	0	-1	0	
Perencana Ahli Muda	10	2	0	0	0	-2	0	
Perencana Ahli Pertama	8	3	3	4	3	1	0	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0	
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0	
Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	2	0	0	0	-2	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	0	0	0	-2	0	

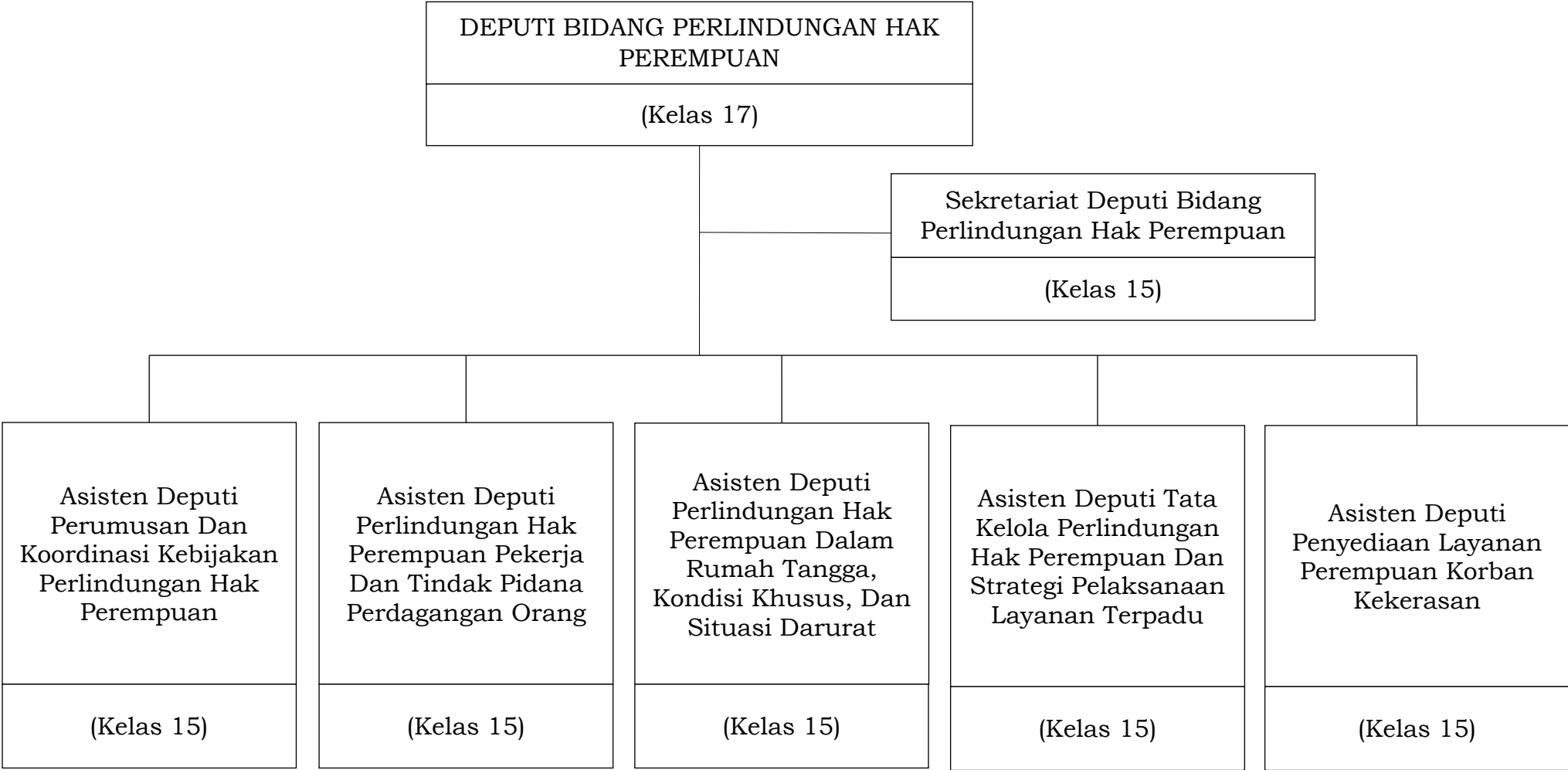
TOTAL PEGAWAI	14	3	6	3	-8	0
	17		9		-8	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

VI. PETA JABATAN DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
- 39 -

A. PETA JABATAN SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	15	1	0	1	0	0	0	
Analisis Anggaran Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0	
Analisis Anggaran Ahli Madya	12	0	0	0	0	0	0	
Analisis Anggaran Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0	
Analisis Anggaran Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0	
Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	4	0	1	0	-3	0	
Analisis Hukum Ahli Pertama	8	0	1	0	1	0	0	
Analisis Hukum Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0	
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0	
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12	0	0	0	0	0	0	
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0	
Analisis Pengelolaan	10	0	0	0	0	0	0	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Kuangan APBN Ahli Muda								
Analisis Pengelolaan Kuangan APBN Ahli Pertama	8	0	0	0	0	0	0	
Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	1	0	0	0	-1	0	
Pranata Keuangan APBN Mahir	8	2	0	0	0	-2	0	
Pranata Keuangan APBN Terampil	7	3	0	1	0	-2	0	
Arsiparis Penyelia	8	0	1	0	1	0	0	
Arsiparis Terampil	6	2	0	0	0	-2	0	
Arsiparis Mahir	7	2	0	0	0	-2	0	
Perencana Ahli Pertama	8	0	2	0	2	0	0	
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	0	2	0	-3	0	
Penata Layanan Operasional	7	0	2	0	0	0	-2	
Pengolah Data dan Informasi	6	3	0	3	0	0	0	
Penata Kelola Hukum dan Perundang- undangan	7	2	0	0	0	-2	0	
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	2	0	0	0	-2	

TOTAL PEGAWAI	32	8	12	4	-20	-4
	40		16		-24	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

B. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN
PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Jabatan	KLS	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	15	1	0	1	0	0	0	
Analisis Kebijakan Ahli Utama	14	0	0	0	0	0	0	
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	4	0	0	0	-4	0	
Analisis Kebijakan Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	4	0	4	0	0	0	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	0	0	0	0	0	
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	2	5	1	5	-1	0	
Perencana Ahli Muda	10	2	0	0	0	-2	0	
Perencana Ahli Pertama	8	2	0	0	0	-2	0	
Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	2	0	0	0	-2	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	0	1	0	-1	0	

TOTAL PEGAWAI	19	5	7	5	-12	0
	24		12		-12	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
- 42 -

C. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
PEKERJA DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	15	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Utama	14	0	0	0	0	0	0	
Perencana Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	2	0	2	0	0	0	
Perencana Ahli Madya	12	0	0	0	0	0	0	
Perencana Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0	
Perencana Ahli Pertama	8	4	2	3	2	-1	0	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0	
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0	
Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	3	0	1	0	-2	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	0	0	0	-2	0	
TOTAL PEGAWAI		16	2	8	2	-8	0	
		18		10		-8		



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

D. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
DALAM RUMAH TANGGA, KONDISI KHUSUS DAN SITUASI DARURAT

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus dan Situasi Darurat	15	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Utama	14	0	0	0	0	0	0	
Perencana Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Madya	12	1	0	0	0	-1	0	
Perencana Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0	
Perencana Ahli Pertama	8	6	0	4	0	-2	0	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0	
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0	
Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	4	0	1	0	-3	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	0	0	0	-3	0	

TOTAL PEGAWAI	20	0	8	0	-12	0
	20		8		-12	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

E. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI TATA KELOLA PERLINDUNGAN HAK
PEREMPUAN DAN STARTEGI PELAKSANAAN LAYANAN TERPADU

Jabatan	KLS	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Startegi Pelaksanaan Layanan Terpadu	15	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Utama	14	0	0	0	0	0	0	
Perencana Ahli Madya	12	1	0	0	0	-1	0	
Perencana Ahli Muda	10	2	0	0	0	-2	0	
Perencana Ahli Pertama	8	3	0	0	0	-3	0	
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	3	0	0	0	-3	0	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	4	0	0	0	-4	0	
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	7	0	0	0	-7	0	
Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	5	0	0	0	-5	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	6	0	0	0	-6	0	

TOTAL PEGAWAI	32	0	1	0	-31	0
	32		1		-31	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
- 45 -

F. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PENYEDIAAN LAYANAN PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan	15	1	0	1	0	0	0	
Penyuluh Sosial Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	3	0	3	0	0	0	
Pekerja Sosial Ahli Madya	11	4	0	0	0	-4	0	
Pekerja Sosial Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0	
Pekerja Sosial Ahli Muda	9	2	0	0	0	-2	0	
Pekerja Sosial Ahli Pertama	8	0	6	0	6	0	0	
Psikolog Klinis Ahli Muda	9	1	0	0	0	-1	0	
Psikolog Klinis Ahli Pertama	8	2	0	0	0	-2	0	
Analisis Hukum Ahli Madya	11	1	0	0	0	-1	0	
Analisis Hukum Ahli Muda	9	1	0	0	0	-1	0	
Analisis Hukum Ahli Pertama	8	1	2	0	2	-1	0	
Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	7	0	3	0	-4	0	
Penata Layanan Operasional	7	10	0	0	0	-10	0	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
- 46 -

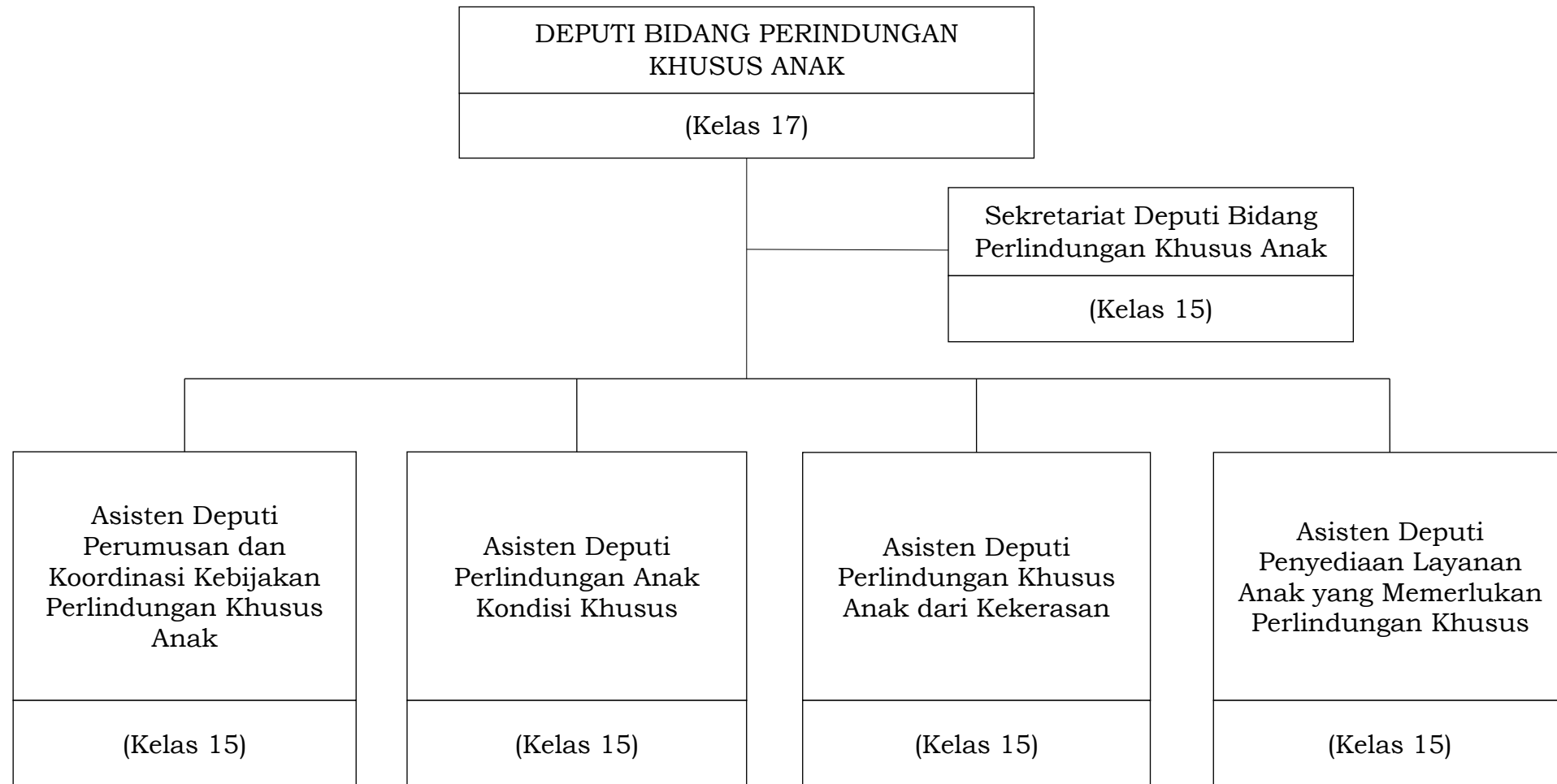
TOTAL PEGAWAI	34	8	8	8	-26	0
	42		16		-26	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

VII. PETA JABATAN DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

A. PETA JABATAN SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN
KHUSUS ANAK

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	15	1	0	1	0	0	0	
Analisis Anggaran Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0	
Analisis Anggaran Madya	12	0	0	0	0	0	0	
Analisis Anggaran Muda (Hasil Penyetaraan)	10	2	0	2	0	0	0	
Analisis Anggaran Muda	10	0	0	0	0	0	0	
Analisis Anggaran Pertama	8	4	0	0	0	-4	0	
Perencana Ahli Pertama	8	0	2	0	2	0	0	
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0	
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12	0	0	0	0	0	0	
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0	
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	0	0	0	0	0	0	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8	0	0	0	0	0	0	
Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	2	0	0	0	-2	0	
Pranata Keuangan APBN Mahir	8	2	0	0	0	-2	0	
Pranata Keuangan APBN Terampil	7	3	0	2	0	-1	0	
Arsiparis Penyelia	8	1	0	0	0	-1	0	
Arsiparis Terampil	6	2	0	0	0	-2	0	
Arsiparis Mahir	7	2	0	0	0	-2	0	
Analisis Hukum Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0	
Analisis Hukum Ahli Pertama	8	0	1	0	1	0	0	
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0	
Penata Kelola Hukum dan Perundang- Undangan	7	2	0	1	0	-1	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	0	3	0	-2	0	
Penata layanan Operasional	7	0	2	0	0	0	-2	
Pengolah Data dan Informasi	6	3	0	3	0	0	0	
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	2	0	0	0	-2	

TOTAL PEGAWAI	34	7	15	3	-19	-4
	41		18		-23	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
- 50 -

B. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN DAN KOORDINASI
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	15	1	0	1	0	0	0	
Analisis Kebijakan Madya (Hasil Penyetaraan)	13	2	0	2	0	0	0	
Analisis Kebijakan Madya	12	2	0	1	0	-1	0	
Analisis Kebijakan Muda (Hasil Penyetaraan)	10	2	0	2	0	0	0	
Analisis Kebijakan Muda	10	2	0	0	0	-2	0	
Analisis Kebijakan Pertama	8	6	1	5	1	-1	0	
Perencana Ahli Muda	10	2	0	0	0	-2	0	
Perencana Ahli Pertama	8	2	0	0	0	-2	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	0	0	0	-4	0	
Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	3	0	0	0	-3	0	

TOTAL PEGAWAI	26	1	11	1	-15	0
	27		12		-15	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
- 51 -

C. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK KONDISI KHUSUS

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	15	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Madya	12	1	0	0	0	-1	0	
Perencana Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0	
Perencana Ahli Pertama	8	6	0	5	0	-1	0	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0	
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0	
Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	4	0	1	0	-3	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	0	0	0	-3	0	

TOTAL PEGAWAI	20	0	9	0	-11	0
	20		9		-11	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
- 52 -

D. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DARI KEKERASAN

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	15	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Madya	12	1	0	0	0	-1	0	
Perencana Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0	
Perencana Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0	
Perencana Ahli Pertama	8	5	1	1	1	-4	0	
Analisis Kebijakan Ahli muda	10	1	0	0	0	-1	0	
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	1	0	0	0	-1	0	
Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	3	0	1	0	-2	0	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	0	0	0	-3	0	
TOTAL PEGAWAI		18	1	5	1	-13	0	
		19		6		-13		



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

E. PETA JABATAN ASISTEN DEPUTI PENYEDIAAN LAYANAN ANAK YANG
MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS

Jabatan	Kelas	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	15	1	0	1	0	0	0	
Penyuluh Sosial Ahli Madya (Hasil Penyetaraan)	13	2	0	2	0	0	0	
Penyuluh Sosial Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0	
Penyuluh Sosial Ahli Muda	9	1	0	1	0	0	0	
Pekerja Sosial Ahli Madya	11	3	0	0	0	-3	0	
Pekerja Sosial Ahli Muda (Hasil Penyetaraan)	10	1	0	1	0	0	0	
Pekerja Sosial Ahli Muda	10	1	0	0	0	-1	0	
Pekerja Sosial Ahli Pertama	8	0	3	0	3	0	0	
Psikolog Klinis Ahli muda	9	1	0	0	0	-1	0	
Psikolog Klinis Ahli Pertama	8	2	0	1	0	-1	0	
Analisis Hukum Ahli Madya	11	1	0	0	0	-1	0	
Analisis Hukum Ahli Muda	9	1	0	0	0	-1	0	
Analisis Hukum Ahli Pertama	8	4	0	0	0	-4	0	
Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan	7	7	0	6	0	-1	0	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
- 54 -

Perlindungan Anak								
Penata Layanan Operasional	7	10	0	0	0	-10	0	

TOTAL PEGAWAI	36	3	13	3	-23	0
	39		16		-23	

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI